

# **IMPLEMENTASI PROGRAM PERHUTANAN SOSIAL SKEMA KEMITRAAN KEHUTANAN PADA KELOMPOK TANI HUTAN PALOIL TOB, DESA SILLU, KECAMATAN FATULEU, KABUPATEN KUPANG**

Alan Kaesmetan, Nixon Rammang, Fadlan Pramatana

Universitas Nusa Cendana  
[kaesmetanalan7@gmail.com](mailto:kaesmetanalan7@gmail.com)

## **ABSTRAK**

Program Perhutanan Sosial dengan skema kemitraan kehutanan merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus menjaga kelestarian hutan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi program perhutanan sosial pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Paloil Tob di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, serta menilai tingkat pencapaian tujuan program berdasarkan aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan kelembagaan.

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode kualitatif dan kuantitatif. Pengambilan sampel dilakukan secara sensus terhadap 33 anggota KTH Paloil Tob serta didukung oleh informan kunci yang terdiri atas penyuluh pendamping dan pihak pengelola kawasan (BPLHK Kupang) yang dipilih secara purposive. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, kuesioner, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan. Data kuantitatif dianalisis menggunakan skala Likert (1–3) dan persentase, sedangkan data kualitatif digunakan sebagai penyeimbang melalui triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi program perhutanan sosial pada KTH Paloil Tob tergolong sangat efektif dengan tingkat pencapaian sebesar 100%. Capaian ini mencerminkan persepsi positif responden terhadap manfaat program pada aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan kelembagaan. Keberhasilan program dipengaruhi oleh dukungan kebijakan, partisipasi masyarakat, efektivitas pendampingan, dan kemitraan. Namun demikian, hasil tersebut perlu diinterpretasikan secara kritis karena belum sepenuhnya menggambarkan tantangan lapangan, seperti perubahan iklim, hama penyakit, dan keterbatasan akses pasar, sehingga diperlukan penguatan kelembagaan dan keberlanjutan usaha.

**Kata Kunci:** Perhutanan Sosial, Implementasi, Kelompok Tani Hutan, Kemitraan Kehutanan.

## PENDAHULUAN

Keberadaan hutan memiliki peran strategis bagi kehidupan manusia, baik sebagai penyedia hasil hutan kayu maupun hasil hutan bukan kayu, serta sebagai penyangga sistem lingkungan dan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya (Widiyanto, 2010). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Pasal 1 Ayat 2 menegaskan bahwa hutan adalah suatu kesatuan ekosistem yang unsur-unsurnya saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Indonesia memiliki kawasan hutan seluas sekitar 125,9 juta hektare (KLHK, 2023). Luasan kawasan hutan tersebut menghadapi tantangan berupa degradasi dan deforestasi yang dipicu oleh penebangan liar, alih fungsi lahan, serta konflik pengelolaan kawasan hutan. Permasalahan tersebut tidak terlepas dari rendahnya kondisi sosial ekonomi masyarakat sekitar hutan, keterbatasan akses legal masyarakat terhadap sumber daya hutan, serta konflik tenurial yang telah berlangsung dalam jangka panjang (Rammang et al., 2014).

Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, khususnya Kabupaten Kupang, program Perhutanan Sosial menjadi salah satu kebijakan strategis dalam pengelolaan kawasan hutan. Salah satu bentuk implementasi kebijakan tersebut adalah skema kemitraan kehutanan, yang melibatkan masyarakat melalui Kelompok Tani Hutan (KTH) bekerja sama dengan pengelola atau pemegang izin kawasan hutan. Skema ini diharapkan dapat menciptakan hubungan kerja sama yang saling menguntungkan antara masyarakat dan pengelola hutan,

serta mendorong pengelolaan hutan yang berkelanjutan.

Berdasarkan hasil observasi awal, KTH Paloil Tob merupakan salah satu Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) unggulan di Kabupaten Kupang yang telah mencapai tingkat kelembagaan tertinggi, yaitu KUPS kelas gold pada tahun 2022. Pencapaian tersebut menunjukkan bahwa secara administratif dan kelembagaan, kelompok ini telah memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam program Perhutanan Sosial. Efektivitas implementasi program Perhutanan Sosial sangat bergantung pada partisipasi dan kontribusi aktif seluruh pemangku kepentingan, baik di tingkat pusat maupun daerah, serta keterlibatan anggota KTH secara menyeluruh.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Penelitian deskriptif dipilih karena bertujuan untuk memberikan gambaran atau uraian yang jelas dan objektif mengenai implementasi program Perhutanan Sosial pada KTH Paloil Tob. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menggambarkan dan memahami fenomena yang terjadi di lapangan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mendukung analisis melalui pengolahan data kuesioner secara sederhana (Hasan et al., 2022).

Jenis data yang digunakan meliputi data primer dan data sekunder. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung melalui kegiatan wawancara, observasi, dan dokumentasi di lapangan. Data primer dikumpulkan berdasarkan daftar pertanyaan dalam kuesioner yang diisi oleh responden, yaitu anggota KTH Paloil Tob di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. Data sekunder merupakan data pendukung yang tidak diperoleh secara langsung di lapangan, melainkan berasal dari sumber tertulis seperti buku, jurnal, laporan, peraturan perundang-undangan, serta publikasi instansi terkait yang relevan dengan penelitian (Nugrahani & Hum, 2014).

Teknik wawancara adalah metode pengumpulan data melalui percakapan yang dilakukan dengan tujuan tertentu antara dua pihak atau lebih. Pendekatan kualitatif dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menjelaskan makna dari data yang disajikan, baik yang berasal dari narasumber maupun data sekunder, sedangkan pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengolah data kuesioner melalui pemberian skor. Pendekatan kuantitatif didasarkan pada teori pengambilan keputusan untuk menentukan prioritas kriteria yang dipilih dan mengukur seberapa besar kinerja implementasi kriteria tersebut di lapangan (Nurfatriani & Alviya, 2019).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### 1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

KTH Paloil Tob berlokasi di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu,

Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Desa Sillu terletak di bagian selatan Pulau Timor dengan jarak sekitar 40 km dari Kota Kupang. Wilayah desa ini memiliki luas  $\pm 12,49$  km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk sekitar 1.500 jiwa. Secara topografis, lokasi penelitian merupakan daerah perbukitan dengan ketinggian rata-rata  $\pm 100$  meter di atas permukaan laut. Kondisi iklim tergolong panas dan kering dengan curah hujan tahunan rata-rata sekitar 1.000 mm. Vegetasi alami yang mendominasi wilayah ini berupa hutan sabana dan semak belukar.

Selain jambu mete sebagai komoditas utama, areal kelola anggota KTH juga ditanami berbagai komoditas wanatani dan pertanian, antara lain porang (*Zea mays*), kacang tanah (*Arachis hypogaea*), labu kuning (*Cucurbita sp.*), ubi jalar (*Ipomoea batatas var. Ayamurasaki*), cabai (*Capsicum annuum L.*), serta tanaman pertanian lainnya. Komoditas potensial yang dapat dikembangkan lebih lanjut meliputi kemiri (*Aleurites moluccana L.*), asam (*Tamarindus indica L.*), johan (*Senna siamea Lam.*), mangga (*Mangifera indica*), cendana (*Santalum album*), gewang (*Corypha utan*), faloak (*Sterculia foetida*), jambu biji (*Psidium guajava*), kayu merah (*Pterocarpus indicus*), kapuk hutan (*Ceiba pentandra*), kelapa (*Cocos nucifera*), kusambi (*Schleichera oleosa*), lontar (*Borassus flabellifer*), mahoni (*Swietenia macrophylla*), nangka (*Artocarpus heterophyllus*), dan pulai (*Alstonia scholaris*).

### 2. Implementasi Program Perhutanan

## Sosial

### 2.1 Pembentukan Kelompok Perhutanan Sosial

KTH Paloil Tob merupakan sebuah Kelompok Tani Hutan (KTH) yang beranggotakan 33 kepala keluarga yang berdomisili di Desa Sillu yang berdiri pada tanggal 13 Oktober 2017. Pembentukan KTH ini didasari oleh kesadaran akan pentingnya pengelolaan hutan secara lestari untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan. Inisiatif pembentukan KTH Paloil Tob muncul dari bawah, yaitu dari keinginan masyarakat sendiri untuk memiliki wadah yang legal dan terorganisir dalam mengelola sumber daya Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) yang ada di wilayah mereka dengan mengimplemetasikan program perhutanan sosial. Pertama, nilai sosial dan gotong royong. Nilai ini tercermin dalam keterlibatan keluarga besar pihak laki-laki dalam mempersiapkan belis (mahar) yang akan diberikan kepada pihak perempuan. Seluruh anggota keluarga berpartisipasi dalam bentuk dukungan moral maupun material. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan merupakan tanggung jawab bersama dan memperkuat solidaritas sosial dalam masyarakat. Berdasarkan pertimbangan telah dilaksanakannya penanda tanganan naskah kesepakatan kerjasama antara KTH Paloil Tob dan BPLHK Kupang dan dilakukan verifikasi oleh BPSKL Seksi Wilayah II NTT yang melalui berita acara verifikasi teknis nomor: BA.85/PKPS/PP/PSKL.0/3/2018. Areal kerja yang direkomendasikan seluas +33,77 Hektare untuk 33 kepala

keluarga di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Setelah mendapatkan izin perhutanan sosial, KTH Paloil Tob mulai melaksanakan kegiatan pengelolaan hutan sesuai dengan rencana kerja yang telah disusun bersama, seperti penanaman, pemeliharaan, perlindungan, dan pemanfaatan HHBK. KTH Paloil Tob juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pemerintahan, swalayan modern, dan perhotelan untuk mendukung pengembangan usaha perhutanan sosial. Sehingga dengan terbentuknya KTH Paloil Tob, masyarakat Desa Sillu khususnya anggota KTH Paloil Tob memiliki wadah yang kuat dan terorganisir untuk mengelola hutan secara lestari, meningkatkan kesejahteraan ekonomi, dan menjaga kelestarian lingkungan secara bersamaan. Petani berperan signifikan dengan berpartisipasi sebagai anggota KTH, yang berfungsi sebagai wadah bagi petani tersebut (Nayasilana., 2022).

### 2.2 Pelaksanaan Tahapan Program Perhutanan Sosial

Pelaksanaan Program Perhutanan Sosial skema kemitraan pada KTH Paloil Tob dilaksanakan melalui tiga aspek utama, yaitu kelola kelembagaan, kelola kawasan, dan kelola usaha. Pembagian aspek ini sejalan dengan kerangka pemberdayaan masyarakat dalam perhutanan sosial yang dikemukakan oleh Rahman (2024), yang menekankan bahwa pengelolaan perhutanan sosial tidak hanya berfokus pada pemanfaatan sumber daya, tetapi

juga pada penguatan kelembagaan dan keberlanjutan kawasan.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi lapangan, dan telaah dokumen, diketahui bahwa program dan kegiatan yang direncanakan dalam perjanjian kerja sama kemitraan kehutanan antara KTH Paloil Tob dan BPLHK Kupang secara umum dilaksanakan melalui mekanisme rapat rutin kelompok yang dilengkapi dengan monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi berfungsi sebagai sarana pengawasan sekaligus refleksi terhadap pelaksanaan

program pemberdayaan masyarakat, yang dilakukan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh anggota kelompok (Tifani et al., 2024).

Realisasi pelaksanaan program dan kegiatan perhutanan sosial skema kemitraan KTH Paloil Tob selama periode lima tahun (2020–2024) disajikan sebagai berikut :

Tabel 4.2 Pelaksanaan Program dan Kegiatan Perhutanan Sosial Skema Kemitraan KTH Paloil Tob 2020-2024

No	Program/Kegiatan	Tata waktu Rencana Pelaksanaan Program					Tata waktu Realisasi Pelaksanaan Program				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>A</b>	<b>Kelembagaan</b>										
1.	Penyusunan rencana kerja	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Pertemuan rutin kelompok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Pemilihan pengurus				✓					✓	
4.	Pemasangan papan informasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Pembuatan dapur	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
<b>B</b>	<b>Kawasan</b>										
1.	Penandaan batas areal kelola				✓					✓	
2.	Penyulaman mente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3.	Pembuatan bokasi				✓	✓				✓	✓
4.	Budidaya lebah kelulut				✓	✓				✓	-

No	Program/Kegiatan	Tata waktu Rencana Pelaksanaan Program					Tata waktu Realisasi Pelaksanaan Program				
		I	II	III	IV	V	I	II	III	IV	V
<b>C</b>	<b>Usaha</b>										
1.	Pemasaran kacang mete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2.	Uji coba sirup mete		✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	-
3.	Inovasi kemasan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4.	Video dokumentasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.	Penanaman kemiri (batas kebun) 10 x 10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6.	Pembibitan mete untuk demplot kelompok	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7.	Penanaman sekitar	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

	sumber mata air										
8.	Penanaman mete demplot mete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9.	Pemeliharaan demplot mete	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10.	Identifikasi potensi/pengukuran luas areal kelola anggota	✓					✓				

Sumber : Data Primer diolah 2025

Berdasarkan Tabel 4.2, diketahui bahwa pada tahun I (2020), tahun II (2021), dan tahun III (2022) direncanakan masing-masing 14 kegiatan, meningkat menjadi 18 kegiatan pada tahun IV (2023), dan 15 kegiatan pada tahun V (2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan dapat direalisasikan sesuai rencana, meskipun terdapat beberapa kegiatan yang mengalami penundaan.

Meskipun demikian, secara umum pelaksanaan program perhutanan sosial skema kemitraan pada KTH Paloil Tob tergolong aktif dan berkelanjutan. Hal ini tercermin dari konsistensi pelaksanaan sebagian besar kegiatan yang direncanakan, yang didukung oleh kekompakan dan komitmen seluruh anggota kelompok. Sejalan dengan Putri et al., (2022), keberhasilan KTH sangat dipengaruhi oleh keterlibatan aktif anggota, kualitas pendampingan, serta dukungan dari berbagai pihak terkait.

### 3. Kinerja Kelompok Perhutanan Sosial

Pada penelitian ini untuk mengukur sejauh mana proses pengimplementasian program perhutanan sosial di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang mengacu pada uraian kriteria dan indikator dalam struktur hirarki penelitian Nurfatriani

dan Alviya (2019), yakni:

#### 1. Aspek Ekonomi

Menurut Nurfatriani dan Alviya (2019), aspek ekonomi dalam Program Perhutanan Sosial berfungsi sebagai instrumen utama untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, khususnya masyarakat yang tinggal di dalam dan di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan hasil wawancara, studi pustaka, dan observasi lapangan, diketahui bahwa areal kelola Perhutanan Sosial KTH Paloil Tob yang dikelola oleh 33 anggota memiliki sebanyak 4.392 pohon jambu mete yang telah produksi. Produksi jambu mete bervariasi, dengan rata-rata hasil panen berkisar antara 5 kg hingga 200 kg per anggota dalam satu kali panen. Secara akumulatif, areal kelola tersebut mampu menghasilkan sekitar 300 kg hingga 1.000 kg biji gelondongan per tahun, yang setara dengan  $\pm 75$  kg hingga 250 kg kacang mete kacip. Selain peningkatan pendapatan dari hasil produksi, keberhasilan aspek ekonomi juga didukung oleh meningkatnya produktivitas lahan yang dikelola secara berkelanjutan. Program Perhutanan Sosial di KTH Paloil Tob turut menciptakan alternatif mata pencaharian baru, baik pada sektor pertanian (*on-farm*) seperti sistem agroforestri, maupun sektor non-pertanian (*off-farm*) melalui

kegiatan wana wiyata. Kegiatan wana wiyata difokuskan pada pengolahan jambu mete, pembukuan usaha, dan pemasaran produk, dengan paket pelatihan satu kali kegiatan bernilai Rp3.160.000,- yang berkontribusi dalam membuka peluang pendapatan tambahan bagi anggota KTH.

## 2. Aspek Sosial Budaya

Penilaian aspek sosial budaya dalam penelitian ini didasarkan pada tiga indikator utama, yaitu kearifan lokal, partisipasi anggota, dan mekanisme resolusi konflik. Selama periode pelaksanaan program Perhutanan Sosial (2020–2024), pengelolaan areal kelola KTH Paloil Tob menunjukkan adanya integrasi antara kegiatan pengelolaan hutan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat setempat. Dari sisi resolusi konflik, Program Perhutanan Sosial di KTH Paloil Tob berperan sebagai wadah penyelesaian konflik terkait lahan dan sumber daya hutan melalui mekanisme musyawarah. Apabila musyawarah tidak menghasilkan kesepakatan, penyelesaian konflik dilakukan melalui jalur hukum sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun demikian, selama lima tahun pelaksanaan program, musyawarah tetap menjadi mekanisme utama dan efektif dalam penyelesaian konflik. Hal ini sejalan dengan pandangan Nurfatriani dan Alviya (2019) yang menyatakan bahwa Perhutanan Sosial diprioritaskan sebagai instrumen untuk menyelesaikan konflik tenurial antara masyarakat dan pemerintah secara adil dan partisipatif.

## 3. Aspek Kelembagaan

Selain itu, penguatan kelembagaan juga ditunjukkan melalui pengembangan sistem pemasaran, baik secara langsung maupun melalui pemanfaatan media digital, serta upaya membangun identitas produk yang kuat. Pembiayaan kegiatan kelompok didukung oleh iuran dan simpanan yang berasal dari hasil penjualan produk utama dan produk olahan, sehingga mendorong kemandirian finansial kelompok. Dukungan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya, seperti bantuan mesin produksi, turut memperkuat kapasitas unit usaha KTH dalam memenuhi kebutuhan anggota dan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Berdasarkan uraian pada keempat aspek tersebut, yaitu aspek ekonomi, sosial budaya, lingkungan, dan kelembagaan, diperlukan penilaian yang lebih terukur untuk mengetahui tingkat efektivitas implementasi Program Perhutanan Sosial pada KTH Paloil Tob. Penilaian tersebut dilakukan dengan menggunakan kriteria dan indikator sebagaimana dirumuskan oleh Nurfatriani dan Alviya (2019), yang kemudian diukur melalui instrumen kuesioner kepada responden penelitian.

## 4. Dampak Kelompok Perhutanan Sosial

### 4.1 Dampak Sosial

KTH Paloil Tob memberikan dampak sosial yang signifikan bagi masyarakat setempat. Melalui program perhutanan sosial, KTH berhasil meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kelestarian hutan. Keberadaan KTH memperkuat ikatan sosial antar anggota melalui kerja sama dalam kegiatan usaha,

menciptakan solidaritas dan rasa kebersamaan dalam kelola kawasan seperti pembagian tanggungjawab dari setiap anggota. Program perhutanan sosial ini juga memberikan dampak positif pada pemberdayaan perempuan dengan melibatkan mereka dalam kegiatan usaha, seperti pengolahan gelondongan maupun kacip kacang mete menjadi produk, sehingga memperkuat peran perempuan dalam keluarga dan masyarakat.

Hasil penelitian ini didukung oleh kajian Kastanya (2019) tentang Kajian Dampak Perhutanan Sosial Wilayah Maluku-Papua, yang menemukan melalui program Perhutanan Sosial, masyarakat secara aktif berperan sebagai pelaku utama dalam pengelolaan hutan lestari. Tingkat pemahaman yang baik terhadap program perhutanan sosial menjadi tolak ukur keberhasilan dan keberlanjutan pengelolaan lahan. Pemahaman yang lebih mendalam mengenai pengelolaan lahan diperoleh melalui interaksi dengan berbagai pihak terkait dan mitra, maupun pengalaman langsung di lapangan. Pengetahuan baru ini kemudian diterapkan secara mandiri maupun berkelompok. Masyarakat juga memahami program perhutanan sosial ini sebagai sarana untuk memperoleh manfaat dari hasil hutan dengan dukungan pemerintah.

#### **4.2 Dampak Ekonomi**

KTH Paloil Tob memberikan dampak ekonomi yang signifikan bagi anggotanya dan masyarakat sekitar. Hal ini terlihat dari KUPS Paloil Tob yang sudah mencapai kategori *gold* melalui pengelolaan unggulannya yaitu Jambu

mete. Dampak ekonomi dari program perhutanan sosial ini dapat teridentifikasi pada KUPS yang tergolong dalam kategori *gold* dan *platinum*, yang menunjukkan bahwa kelompok-kelompok ini telah memiliki akses terhadap modal dan pasar (Mutaqin *et al.*, 2022). KTH Paloil Tob dengan kategori *gold* saat ini berhasil meningkatkan pendapatan anggotanya dengan total pendapatan saat panen mencapai Rp.84.000.000,- dalam 1 tahun panen dari biji Jambu mete gelondongan, kacip mete super maupun belah 2 dan biji mete hancur, dimana pada tahun 2020 total pendapatan baru mencapai Rp.75.609.200,- dari 510.25 kg total produksi kacang mete, lalu naik menjadi Rp.85.420.000,- dari 574.00 kg total produksi kacang mete, namun pada 2022 mengalami penurunan menjadi Rp.72.463.000,- dari 482.80 kg, dan produksi dan pendapatan kacang mete dan kembali naik pada tahun 2023 menjadi Rp.83.700.000,- dari 563.75 kg, namun pada tahun 2024 mengalami penurunan yang drastis menjadi Rp.49.310.000 dari 326.75 kg dikarenakan terjadi persaingan antara kelompok usaha dan tengkulak dalam membeli biji mete gelondongan milik anggota serta hama dan penyakit yang menyerang tanaman Jambu mete. Diversifikasi hasil menjual gelondongan maupun kacang mete kacip ini dapat memberikan stabilitas ekonomi bagi anggota KTH.

### **5. Peran Para Pihak**

#### **5.1 Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan**

Berdasarkan hasil penelitian, BPLHK Kupang memiliki peran yang

sangat penting dalam implementasi program perhutanan sosial skema kemitraan di KTH Paloil Tob. Sebagai pengelola kawasan KHDTK, BPLHK Kupang berperan strategis dalam mendukung peningkatan kelas usaha perhutanan sosial melalui penyediaan pendampingan teknis dan penguatan kelembagaan kelompok.

Pendampingan tersebut diwujudkan melalui bantuan teknis pengelolaan kawasan secara lestari, pengembangan organisasi, serta perbaikan tata kelola usaha perhutanan sosial. Peran ini bertujuan untuk mendorong anggota KTH mengembangkan inovasi usaha yang mampu meningkatkan nilai tambah produk hasil hutan bukan kayu, baik produk utama maupun produk olahan, sehingga berdampak pada peningkatan perekonomian anggota kelompok. Temuan ini sejalan dengan Rahman et al. (2021) dalam Lawasi (2022) yang menyatakan bahwa pendampingan yang efektif dalam perhutanan sosial mencakup aspek teknis, pengelolaan organisasi, dan tata kelola usaha.

## 5.2 Masyarakat Desa Sillu

Dalam program perhutanan sosial skema kemitraan, masyarakat Desa Sillu, khususnya anggota KTH Paloil Tob, berperan sebagai aktor pendukung sekaligus pelaksana utama di tingkat tapak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masyarakat turut mendukung pelaksanaan program dengan berpartisipasi aktif dalam kegiatan pengelolaan kawasan KHDTK. Perhutanan sosial pada dasarnya merupakan sistem pengelolaan hutan yang melibatkan masyarakat lokal

sebagai aktor utama dalam pengelolaan sumber daya hutan, baik pada kawasan hutan negara maupun hutan milik masyarakat. Hal ini diperkuat oleh Kim et al. (2016) dalam Nurfatriani dan Alviya (2019) yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat merupakan prasyarat penting dalam pengelolaan sumber daya alam yang efektif. Keterlibatan tersebut tidak hanya meningkatkan pendapatan dan kemandirian ekonomi masyarakat, tetapi juga berkontribusi terhadap pelestarian lingkungan.

## 6. Faktor Pendukung dan Penghambat

### 6.1 Faktor Pendukung

1. Dukungan kebijakan: Dukungan kebijakan pemerintah menjadi faktor utama dalam pelaksanaan perhutanan sosial. Kebijakan ini memberikan landasan hukum dan kepastian bagi masyarakat dalam mengelola kawasan hutan secara legal dan berkelanjutan, antara lain melalui penerbitan SK Persetujuan Pengelolaan Perhutanan Sosial. Payung hukum tersebut mencakup Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, serta Peraturan Menteri LHK Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial. Dengan adanya kebijakan tersebut, pemberdayaan masyarakat sebagai pelaku utama pengelolaan hutan semakin didorong, sehingga berkontribusi dalam memperkuat legalitas serta keberlanjutan KUPS.
2. Ketersediaan sumber daya hutan:

Ketersediaan sumber daya hutan yang memadai menjadi faktor pendukung penting dalam pengembangan KUPS. KTH Paloil Tob memiliki potensi hasil hutan bukan kayu (HHBK) seperti jambu mete, lebah madu, kemiri, porang, serta hasil wanatani berupa jagung dan kacang-kacangan, termasuk pengembangan wana wiyata. Potensi ini menjadi basis utama dalam pengembangan usaha produktif yang berkelanjutan dan mendorong peningkatan pendapatan anggota KTH. Hal ini sejalan dengan Wulandari et al. (2019) yang menyatakan bahwa ketersediaan sumber daya alam hayati mampu mendorong partisipasi masyarakat dalam program kemitraan.

3. Partisipasi aktif masyarakat: Tingginya partisipasi dan kesadaran masyarakat Desa Sillu, khususnya anggota KTH Paloil Tob, terhadap pentingnya pengelolaan hutan secara lestari menjadi modal sosial yang mendukung keberhasilan program. Kekompakan dan komitmen anggota dalam pertemuan rutin bersama pendamping dari Balai Pelatihan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kupang mencerminkan keterlibatan aktif masyarakat. Dampak positif yang dirasakan juga mendorong munculnya inisiatif pembentukan KTH baru melalui skema kemitraan serupa, yang menunjukkan meningkatnya kepercayaan dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumber daya hutan. Hal ini memperkuat posisi KUPS sebagai instrumen peningkatan kesejahteraan

masyarakat (Lawasi, 2022).

4. Pendampingan dan pembinaan: Pendampingan dan pembinaan dari BPLHK Kupang serta *stakeholder* lainnya berperan dalam meningkatkan kapasitas teknis, kelembagaan, dan manajerial anggota KTH. Dukungan ini memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengelola hutan secara lestari sekaligus mengembangkan usaha produktif. Pendampingan yang berkelanjutan berkontribusi terhadap penguatan KUPS dan peningkatan kualitas hidup masyarakat, sebagaimana ditegaskan oleh Zulkarnain (2021) dalam Lawasi (2022).
5. Kemitraan dengan pihak lain: Kemitraan dengan berbagai pihak, baik sektor swasta maupun instansi pemerintah, membuka akses pasar dan peluang usaha bagi KTH Paloil Tob. Kerja sama dengan swalayan modern, toko oleh-oleh, perhotelan, serta instansi seperti BBKSDA dan PLN berpotensi memperluas jaringan pemasaran produk KUPS. Kolaborasi lintas pihak ini menjadi faktor penting dalam menjamin keberlanjutan dan daya saing usaha perhutanan sosial (Puspitasari et al., 2019).

## 6.2 Faktor Penghambat

Selain faktor pendukung, penelitian ini juga mengidentifikasi beberapa faktor penghambat yang mempengaruhi peningkatan KUPS pada KTH Paloil Tob, antara lain perubahan iklim, serangan hama dan penyakit, serta persaingan dengan tengkulak.

1. Perubahan iklim: Perubahan iklim,

khususnya peningkatan curah hujan pada fase pembungaan dan pematangan jambu mete, menyebabkan penurunan kualitas dan kuantitas hasil produksi. Kondisi ini berdampak langsung terhadap pendapatan anggota KTH dan menghambat stabilitas usaha KUPS. Temuan ini sejalan dengan Ihsan et al. (2023) yang menyatakan bahwa ketidakpastian iklim menjadi faktor utama penurunan produksi jambu mete.

2. Hama dan penyakit: Serangan hama dan penyakit, seperti *Helopeltis spp.*, menyebabkan penurunan produktivitas tanaman jambu mete dan menimbulkan kerugian ekonomi bagi anggota KTH. Selain menurunnya hasil panen, biaya pengendalian hama juga menjadi beban tambahan yang turut mempengaruhi pendapatan serta stabilitas ekonomi keluarga anggota KTH Paloil Tob.
3. Persaingan dengan tengkulak: Keberadaan tengkulak sebagai perantara pemasaran jambu mete seringkali menempatkan anggota KTH pada posisi tawar yang lemah. Harga beli yang rendah serta keterikatan hutang piutang menyebabkan anggota sulit memasarkan produk melalui KUPS secara optimal. Kondisi ini menghambat penguatan kelembagaan dan kemandirian ekonomi KTH, sebagaimana dikemukakan oleh Syarif et al. (2016).

Secara keseluruhan, faktor-faktor penghambat tersebut saling

berkaitan dan dapat mempengaruhi keberhasilan program perhutanan sosial di KTH Paloil Tob. Oleh karena itu, diperlukan upaya strategis untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut guna mendukung kemajuan kelompok serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis terhadap implementasi program Perhutanan Sosial dengan skema kemitraan kehutanan pada Kelompok Tani Hutan (KTH) Paloil Tob di Desa Sillu, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, dapat disimpulkan bahwa implementasi program berjalan secara kolaboratif dan adaptif di tingkat tapak.

Keberhasilan program tidak terjadi secara kebetulan, melainkan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci. Pertama, adanya kelembagaan kelompok yang relatif kuat memungkinkan koordinasi dan pembagian peran berjalan efektif. Kedua, pendampingan yang berkelanjutan berperan dalam meningkatkan kapasitas anggota serta menjaga konsistensi pelaksanaan program. Ketiga, pemanfaatan potensi lokal, khususnya hasil hutan bukan kayu seperti jambu mete, memberikan dasar ekonomi yang nyata bagi anggota. Kombinasi faktor-faktor tersebut menjadikan program mampu menghasilkan dampak positif secara ekonomi, sosial, dan lingkungan, sekaligus memperkuat legitimasi program di tingkat masyarakat.

Namun demikian, jika ditinjau dari perspektif keberlanjutan, implementasi program ini belum

sepenuhnya mencapai kondisi yang ideal. Ketergantungan pada satu komoditas utama, keterbatasan akses pasar, serta lemahnya posisi tawar terhadap tengkulak menunjukkan bahwa fondasi ekonomi kelompok masih rentan. Selain itu, keberlanjutan program juga masih dipengaruhi oleh intensitas pendampingan eksternal, yang mengindikasikan bahwa kemandirian kelompok belum sepenuhnya terbentuk. Dalam konteks ini, efektivitas program lebih mencerminkan keberhasilan jangka menengah, namun belum sepenuhnya menjamin keberlanjutan jangka panjang.

#### DAFTAR PUSTAKA

Banda, Y. M. (2022). Budidaya tanaman jambu mete dan pemasaran dalam meningkatkan pendapatan masyarakat Desa Hokeng Jaya. Ekspektasi: Jurnal Pendidikan Ekonomi, 7(1), 41–49.

Fitria, W., Suharjo, D., & Ekawati, S. (2021). Peran kesatuan pengelolaan hutan (KPH) dalam implementasi perhutanan sosial: Studi di KPH Produksi Kerinci Provinsi Jambi dan KPH Lindung Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan, 18(2), 145–160.

Hasan, S., Niapele, S., & Salim, T. (2022). Implementasi program perhutanan sosial skema hutan kemasyarakatan di Kelurahan Jaya Kecamatan Tidore Utara Kota Tidore Kepulauan. Agrikan: Jurnal Agribisnis Perikanan, 15(2), 855–861.

Ihsan, I., Timisela, N. R., & Leatemia, E. D. (2023). Strategi pengembangan agribisnis jambu mete. Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian, 19(1), 29–38.

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). Paparan capaian perhutanan sosial 2007–2023. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan.

Lawasi, M. A. (2022). Mengkonstruksi akses, pendampingan, dan inovasi sebagai formula kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam program perhutanan sosial. Jurnal Ilmu Administrasi Negara, 20(3), 222–237.

Nasution, A. F. (2023). Metode penelitian kualitatif.

Nayasilana, I. N., Agustina, A., Pertiwi, Y. A. B., Apriyanto, D., Rahmadwiati, R., & Wicaksono, R. L. (2022). Pelatihan penyusunan AD/ART pada kelompok tani hutan Green Lawu sebagai upaya penguatan kelembagaan. Dalam Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat & CSR Fakultas Pertanian UNS (Vol. 2, No. 1, hlm. 162–169).

Nugrahani, F. (2014). Metode penelitian kualitatif. Cakra Books.

Nurfatriani, F., & Alviya, I. (2019). Efektivitas kebijakan alokasi lahan 12,7 juta ha untuk perhutanan sosial: Studi kasus Provinsi Nusa Tenggara Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan,

16(1), 47–66.

Puspitasari, S. A., Saragih, H. J., & Navalino, R. D. A. (2019). Perhutanan sosial dalam mendukung pemberdayaan masyarakat dari perspektif ekonomi pertahanan (studi pada Desa Pantai Bakti Kecamatan Muara Gembong Kabupaten Bekasi). *Jurnal Ekonomi Pertahanan*, 5(1), 121–142.

Rahman, F., Irwandi, A., & Apriwan, A. (2024). Hutan Nagari Simancuang: Pengelolaan hutan skema perhutanan sosial di Kabupaten Solok Selatan. *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 24(3), 2190–2198.

Rammang, N., Mahendra, M. S., & Suyasa, B. (2014). Tingkat kerusakan dan strategi pengelolaan Taman Hutan Raya “Prof. Ir. Herman Johannes” di Desa Kotabes Kecamatan Amarasi Kabupaten Kupang NTT. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 8.

Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

Sugiyono. (2010). Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.

Sudrajat, A., & Yuliana, R. (2024). Kemitraan strategis UKM dan komunitas petani hutan dalam pengelolaan hasil hutan non-kayu untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi di Sukabumi. Dalam *Prosiding Seminar Nasional Manajemen dan Bisnis*

(Vol. 4, hlm. 17–25).

Tifani, N. C., & Syafitri, F. (2024). Kemitraan otentik pendamping dalam pemberdayaan kelompok perhutanan sosial. *Jurnal ISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 21(2), 145–165.

Widiyanto, A. (2010). Hutan sebagai pengatur tata air dan pencegah erosi tanah: Pengelolaan dan tantangannya. Balai Penelitian Kehutanan Ciamis.

Wulandari, C., Bintoro, A., Rusita, R., Santoso, T., Duryat, D., Kaskoyo, H., & Budiono, P. (2018). Adopsi hutan kemasyarakatan berbasis keanekaragaman jenis pohon multiguna menuju pengelolaan hutan lestari. *Biodiversitas*, 19(3), 1102–1109.

